

Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Mutu Internal dan Budaya Mutu Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi (Studi Empiris Pada Perguruan Tinggi di Propinsi Bengkulu)

Tuti Hermelinda¹, Meriana², Berlian Afriansyah³

Politeknik Raflesia Rejang Lebong

Jl. S. Sukowati No. 28 Curup

tutihermelinda@gmail.com

merianaandi@gmail.com

bafrians@gmail.com

ABSTRACT

This study used a survey method to examine the effect of the implementation of the Internal Quality Control System and Quality Culture on the Improvement of the Quality of Higher Education in Bengkulu Province. The research method used was a statistical test, namely the effect test with stages; Data Normality Test, Multiple Regression Analysis and Hypothesis Testing. The regression model equation in this study is $Y = 14.883 + 0.544X_1 + 0.165X_2$. This equation shows that the increase in each variable X_1 and X_2 will increase variable Y , assuming the other variables are fixed. This means that the implementation of the Internal Quality Control System and Quality Culture will improve the Quality Improvement of Higher Education. Based on the results of the F test, it was obtained a significance value of 0.000 and less than $\alpha = 0.05$. This shows that at the 95% confidence level the regression model in this study is declared significant and feasible. The result of multiple linear regression test shows that the value of $R^2 = 0.371$. This shows that the influence of each independent variable, namely the Internal Quality Control System and Quality Culture on the dependent variable, namely the Improvement of the Quality of Higher Education is 36.7%, while the rest is influenced by other factors beyond the one examined by the author. The results of the t -test analysis show that the Internal Quality Control System variable t value is 11.913 with a significance of 0.000. This means that the Internal Quality Control System variable has a significant effect on improving the quality of higher education. Furthermore, the Quality Culture variable shows a positive t value of 3.618 with a significance value of 0.000. This shows that the significance value is less than 0.05 and t is positive so that there is a significant influence between Quality Culture on Improving the Quality of Higher Education.

Keywords: Higher Education Quality, SPMI & Quality Culture

1. Latar Belakang

Sebelum tahun 1998, kendali Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sangat besar, terbukti dengan corak peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi di masa tersebut. Sebagai contoh, dapat dikemukakan tentang ketentuan kurikulum nasional atau kurikulum inti untuk setiap program studi yang ditetapkan Pemerintah dan wajib diterapkan oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. Demikian pula keberadaan ujian negara, legalisasi ijazah PTS oleh Pemerintah, model statuta, dan masih banyak lagi yang merupakan bukti besarnya kendali pemerintah. Gerakan reformasi pada tahun 1998 telah membuahkan hasil bahwa dominasi peran Pemerintah di dalam hampir semua sektor dideregulasi sedemikian rupa, termasuk sektor pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi telah dikembalikan kepada kodratnya, yaitu pendidikan tinggi secara kodrati memiliki kebebasan akademik, otonomi keilmuan, dan perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi memiliki otonomi perguruan tinggi. Pentingnya pengendalian internal bagi manajemen dan auditor independen telah diakui dalam literatur profesional selama beberapa tahun.

Pengendalian internal dirancang, diimplementasikan dan dipelihara oleh manajemen dan karyawan lain untuk menangani risiko bisnis dan risiko kecurangan

yang diketahui mengancam pencapaian tujuan entitas, seperti pelaporan keuangan yang andal. Pengendalian selalu merupakan jawaban untuk menangkal (*mitigate*) suatu ancaman (kemungkinan terjadinya risiko). Pengendalian yang tidak merupakan jawaban untuk menangkal ancaman adalah kesia-siaan (*redudant*). (Mulyadi (2016: 98)). Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mencetak para intelektual muda juga tak luput dari masalah pengendalian internal yang semestinya diterapkan pada masing-masing perguruan tinggi. Sejak tahun 2003 tersebut, kurikulum nasional atau kurikulum inti, legalisasi ijazah PTS, model statuta sebagai bentuk kendali mutu oleh Pemerintah dihapuskan secara bertahap, penghapusan ini menyebabkan perguruan tinggi harus menetapkan, melaksanakan, mengendalikan dan meningkatkan kegiatan penjaminan mutu pendidikan tingginya secara otonomi atau mandiri. Setelah lebih dari 20 tahun perguruan tinggi dikendalikan oleh pemerintah, memang terjadi kegamangan perguruan tinggi untuk melakukan penjaminan mutu secara otonom. Untuk itu Ditjen Dikti menginisiasi gagasan penjaminan mutu didalam perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi sendiri. Dengan adanya Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi maka tanggung jawab atas mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut tidak lagi berada ditangan pemerintah. Setelah 5 (lima) tahun pelaksanaan

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi maka Ditjen Dikti mengintegrasikan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang disingkat SPM Dikti yang terdiri atas Sistem Pengendalian Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dan Pangkalan Data Dikti. Pengendalian Intern yang dibahas pada penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Mutu Internal (SPMI) yang telah diterapkan atau diimplementasikan oleh masing-masing perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta yang ada di propinsi Bengkulu. SPMI adalah kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program studi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Sebagai contoh, SPMI di Universitas tidak cocok diimplementasikan di sekolah tinggi. Demikian pula, SPMI diperguruan tinggi kelas dunia tidak cocok digunakan di perguruan tinggi dengan visi lokal. Sesuai dengan istilah "internal" di dalam SPMI, kelima langkah tersebut harus dilaksanakan secara internal oleh perguruan tinggi. Sebagai contoh, langkah evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Dikti dalam SPMI di suatu perguruan tinggi tidak dapat dilaksanakan oleh lembaga lain diluar perguruan tinggi tersebut meskipun lembaga tersebut dipandang kredibel. Dengan mengimplementasikan SPMI maka diyakini bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia akan mampu membangun budaya organisasi yang dalam penelitian ini akan dikhususkan pada budaya mutu, baik diperguruan tinggi masing-masing maupun berkontribusi pada pembangunan budaya mutu pendidikan tinggi pada tingkat nasional. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang banyak membahas mengenai implementasi pengendalian internal dan budaya organisasi pada perguruan tinggi.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal

Menurut Pedoman Sistem Penjaminan Mutu (2017:21), Ada beberapa hal mendasar yang harus ada dalam setiap SPMI perguruan tinggi yang disingkat PPEPP

yaitu Penerapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan bagian terpenting dari SPMI setiap perguruan tinggi.

2.2 Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal

Prinsip SPMI yang sesuai dengan UU Dikti dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Otonom
SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (jurusan), Departemen, Sekolah atau bentuk lain maupun pada aras perguruan tinggi.
- b. Terstandar
SPMI mengguakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
- c. Akurasi
SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.
- d. Berencana dan Berkelanjutan
SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.
- e. Terdokumentasi
Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis.

2.3 Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal

a. Tujuan SPMI

SPMI bertujuan :

- 1) Untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat tercapai jika setiap perguruan tinggi mengimplementasikan SPMI dengan baik dengan benar.
- 2) Pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi
- 3) Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi tersebut

b. Fungsi SPMI

- 1) Bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi.
- 2) Sistem untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi.
- 3) Sarana untuk memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi.
- 4) Sistem untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi.

2.4 Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal

- a. Buku/Dokumen Kebijakan SPMI
- b. Buku/Dokumen Manual SPMI
- c. Buku/Dokumen Standar SPMI
- d. Buku/Dokumen Formulir /Proforma SPMI

2.5 Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Menurut Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, implementasi SPMI adalah tindakan konkrit setiap perguruan tinggi mulai dari :

- a. Menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen.
- b. Melaksanakan isi dari dokumen tersebut terutama standar SPMI.
- c. Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan dari isi Dokumen SPMI tersebut.
- d. Meningkatkan Mutu atas isi dari dokumen SPMI Tersebut.

2.6 Pengertian Budaya Mutu

Menurut Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Budaya mutu adalah Semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*) memiliki :pola pikir, pola sikap dan pola perilaku berdasarkan standar Dikti.

2.7 Sistem Pengendalian Mutu Internal, Budaya Mutu dan Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi

Menurut Dirjen Dikti (2010), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disuatu perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang bersangkutan, sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan dari Pemerintah. Penjaminan Mutu didefinisikan sebagai proses penetapan dan pemenuhan standarmutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehinggapihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi diperguruan tinggi oleh perguruan tinggi secara otonom mengendalikan danmeningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana danberkelanjutan. Sebagaimana ditetapkan dalam Permenristekdikti Nomor 62 Tahun2016 Tentang SPM Dikti.Suatu perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila (Dirjen Pembelajaran danKemahasiswaan, 2016): (1) Perguruan tinggi mampu menetapkan dan mewujudkanvisinya ; (2) Perguruan tinggi mampu menjabarkan visinya ke dalam sejumlahstandar dan standar turunan; (3) Perguruan tinggi mampu menerapkan,mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar dan standar turunan dalambutir buntut memenuhi kebutuhan *stakeholders*.

Dengan demikian perguruan tinggi harus mampu menetapkan, menerapkanmengendalikan, dan mengembangkan standar mutu pendidikan tinggi dalam suatusistem yang disebut SPMI, untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yangdiselenggarakannya.Implementasi SPMI di perguruan tinggi sering menemui masalah, antara lain: (1) kesadaran para pelaku proses pendidikan terhadap arti penting penjaminan mutu sebagai kebutuhan *stakeholders* relatif masih rendah; (2) pemahaman konsep sistem penjaminan mutu pendidikan oleh sivitas akademika untuk meningkatkan mutu pendidikan masih belum merata; (3) komitmen para pelaku proses pendidikan tinggi di perguruan tinggi, baik yang memimpin maupun yang dipimpin untuk senantiasa menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan relatif masih kurang; (4) Ketersediaan sumber daya manusia khususnya tenaga auditor untuk mendukung SPMI masih belum terpenuhi; dan (5) implementasi SPMI sering menjadi sebuah rutinitas menyebabkan sulit untuk mengukur ketercapaian perbaikan berkelanjutan. Orientasi terhadap mutu membutuhkan sistem penjaminan mutu agar mutu dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Penjaminan mutu tersebut dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Mutu pendidikan di perguruan tinggi yang paling sering didefinisikan sebagai "kesesuaian untuk tujuan", maka jaminan mutu mengacu pada kebijakan, sikap, tindakan dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan mutu yang sedang dipertahankan dan ditingkatkan yang semuanya tercermin dalam budaya mutu. Budaya mutu tersebut dimaksudkan untuk menjamin akuntabilitas dan/atau untuk membawa perbaikan kepada peningkatan mutu pendidikan tinggi.

Implementasi SPMI secara internal dimanfaatkan untuk peningkatan mutu pendidikan dalam tahap perencanaan. Temuan dalam SPMI akan dijadikan masukan untuk memperbaiki standar dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Pemanfaatan hasil implementasi SPMI selain digunakan dalam perencanaan pendidikan, juga digunakan untuk menumbuhkan semangat bekerja lebih baik, membangkitkan kesadaran untuk membangun budaya mutu, sehingga akan terwujud

perbaikan yang terus menerus (*continuous quality improve-ment*). (Ahmad Sulaiman, 2016).

Pentingnya implementasi SPMI dan Budaya Mutu dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi juga berpengaruh terhadap kepuasan *stakeholders*. Kepuasan *stakeholders* internal merupakan salah satu indikator keberhasilan mutu perguruan tinggi. Hal menunjukkan bahwa penerapan sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi sangat penting dalam meningkatkan mutu, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan apa yang diharapkan *stakeholder*. Nilai penting dari sebuah upaya dari sistem penjaminan mutu internal apabila temuan yang diperoleh ditindaklanjuti oleh perencana dan pelaksana program untuk perbaikan di masa – masa yang akan datang. SPMI dibuat sebagai dasar untuk mengendalikan pengelolaan pendidikan tinggi bermutu dengan standar Nasional dan memenuhi peraturan pemerintah Republik Indonesia. Proses SPMI tidak terlepas dari kebijakan mutu, sasaran mutu penyelenggaraan pendidikan, serta seluruh dokumen mutu yang harus disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika dan pimpinan lembaga agar diimplementasikan secara optimal. (M. Fitrah, 2018)

Peningkatan mutu pendidikan tinggi merupakan tugas semua unsur yang terlibat dalam dunia pendidikan tinggi. Dengan mengimplementasikan SPM Dikti yang terdiri dari SPMI, SPME dan PD Dikti diyakini bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia akan mampu membangun budaya mutu baik di perguruan tinggi masing-masing maupun akan berkontribusi pada pembangunan budaya mutu pendidikan tinggi pada tingkat nasional yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. (Ristekditi, 2017:67)

3 Metode

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan desain penelitian yang digunakan adalah desain deskriptif untuk mendeskripsikan variabel-variabel penelitian dan desain kausal untuk mencari pengaruh antar variabel penelitian (Sekaran, 2017). Penetapan hipotesis yang mengacu pada kajian teoritis dan empiris merupakan langkah selanjutnya. Variabel-variabel penelitian yang dihasilkan dari hipotesis tersebut dilengkapi dengan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan SPSS. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada Perguruan Negeri Dan Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Propinsi Bengkulu. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan dan dibahas sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan hasil penelitian dan diberikan saran terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi, khususnya di provinsi Bengkulu.

3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel pada penelitian ini terdiri dari :

Tabel 1. Definisi Operasional Penelitian

Nama Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Sumber
SPMI (X1)	Kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.	1. Otonom 2. Terstandar 3. Akurasi 4. Berencana & Berkelanjutan	Kemenristekdikti, 2017

Budaya Mutu (X2)	Semua pihak yang berkepentingan (<i>stake holders</i>) memiliki :pola pikir, pola sikap dan pola perilaku berdasarkan standar Dikti	1. Pola Sikap 2. Pola Pikir 3. Perilaku	PerMenrist ekdikti Nomor 62 Tahun 2016
Mutu Pendidikan Tinggi (Y)	Tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi	1. SPMI 2. SPME 3. Pangkalan Data Dikti	PerMenrist ekdikti Nomor 62 Tahun 2016

Sumber : diolah dari berbagai sumber, 2020

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan Kuesioner. Kuesioner disusun berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Kuesioner dalam penelitian ini berbentuk skala bertingkat (skala Likert) dengan lima alternatif jawaban dan masing-masing diberi skor. Skala Likert lima poin merupakan skala yang paling umum dipergunakan dalam penelitian dan memiliki indeks validitas, reliabilitas, kekuatan diskriminasi, serta stabilitasnya yang cukup baik (Dawes, 2008; Preston dan Colman, 2000; Budiaji, 2013). Sugiyono (2013:133) menyatakan bahwa “Skala likert variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.” Pengukuran masing-masing variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert lima poin yaitu: 1 = sangat tidak setuju (STS), 2 = tidak setuju (TS), 3 = netral (N), 4 = setuju (S), 5 = sangat setuju (SS)

3.4 Metode Analisis

a) Uji Validitas Data

Uji validitas konstruk menggunakan perhitungan dengan korelasi *product moment*. Validitas konstruk menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan suatu pengukuran sesuai teori-teori yang digunakan untuk mendefinisikan suatu konstruk (Sekaran, 2017). Batas minimum dianggap memenuhi syarat valid apabila $r = 0,3$. Jadi untuk memenuhi syarat validitas, maka butir angket dalam penelitian harus memiliki koefisien korelasi ($r \geq 0,3$). Apabila korelasi antara butir ($r < 0,3$) maka item pernyataan dalam kuesioner penelitian dinyatakan tidak valid. Pengujian validitas kuesioner masing-masing variabel dalam penelitian ini menggunakan *software* SPSS.

b) Uji Reabilitas Data

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh kuesioner penelitian. Pengujian reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan perhitungan dengan menggunakan rumus *Cronbach's Alpha* dengan berbantuan program SPSS. Hal ini sesuai dengan pendapat Ghazali (2011: 42) menyebutkan bahwa variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,6. Berdasarkan data hasil analisis validitas dan reliabilitas yang telah diuraikan maka disimpulkan bahwa data yang diperoleh dari instrumen penelitian dapat digunakan untuk dilakukan analisis pengujian hipotesis penelitian, yaitu uji regresi linier berganda.

c) Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk melihat apakah didalam model regresi tersebut terdapat suatu penyimpangan, sehingga perlu diadakan pemeriksaan dengan menggunakan pengujian multikolinearitas, heteroskedasitas, auto korelasi dan uji normalitas.

d) Uji Normalitas

Ghozali (2011) menyatakan uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk menguji normal atau tidaknya model regresi dapat diuji menggunakan analisis statistik dengan melihat nilai rasio Skewness dan Rasio Kurtosis. Rasio skewness dan rasio kurtosis dapat dijadikan petunjuk apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Rasio skewness adalah nilai skewnes dibagi dengan standard error skewness; sedang rasio kurtosis adalah nilai kurtosis dibagi dengan standard error kurtosis. Sebagai pedoman, bila rasio kurtosis dan skewness berada di antara -2 hingga $+2$, maka distribusi data adalah normal (Ghozali, 2011).

d) Uji Multikolinieritas

Ghozali (2011) menyatakan bahwa Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antar variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi diantara variabel independen. Uji Multikolinearitas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai *tolerance*. Jika $VIF > 10$ dan nilai *tolerance* $< 0,10$ maka terjadi gejala Multikolonearitas.

e) Uji Heteroskedasitas

Ghozali (2011) menyatakan bahwa uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, atau disebut homokesasitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedasitas atau tidak heterokedasitas. Heterokedasitas ditandai dengan adanya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang terukur, maka terjadi heterokedasitas. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedasitas. Selain itu, heterokedasitas dapat diketahui melalui uji Glesjer. Jika probabilitas signifikansi masing-masing variabel independen $> 0,05$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedasitas dalam model regresi.

f) Analisis Regresi Linear Berganda

Analisa yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara beberapa variabel independen terhadap variabel dependen digunakan rumus menurut Ghozali (2011) sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Mutu Pendidikan Tinggi

a = Konstanta

$b_1b_2b_3$ = Slope yaitu koefisien kecondongan garis

X_1 = Implementasi SPMI

X_2 = Implementasi Budaya Mutu

e = Error

g) Pengujian Hipotesis**1. Pengujian Secara Simultan**

Ghozali (2011) menyatakan bahwa uji F digunakan untuk mengetahui besarnya dampak atau pengaruh nyata dalam variabel independen (X_1) dan (X_2)

terhadap variabel dependen (Y) secara bersama-sama dengan langkah-langkah pengujianya sebagai berikut:

- a. Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif
Ho : $\beta_1:\beta_2 = 0$, Implementasi SPMI dan Budaya Mutu berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi.
Ho : $\beta_1:\beta_2 \neq 0$, artinya Implementasi SPMI dan Budaya Mutu secara simultan tidak berpengaruh terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi

b. Menentukan *level of significance* (α) = 0,05; df = (α ; n-k-1)

c. Kriteria pengujian

Pada tabel ANOVA didapat uji F yang menguji semua variabel bebas yang akan mempengaruhi persamaan regresi. Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga diambil keputusan berdasarkan probabilitas dengan dasar pengambilan keputusan:

- 1) Jika probabilitas > tingkat signifikan (α) maka H_a ditolak dan H_o diterima. Dengan kata lain variabel independen (X_1, X_2) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).
- 2) Jika probabilitas < tingkat signifikan (α) maka H_a diterima dan H_o ditolak, dengan kata lain variabel independen (X_1 dan X_2) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Uji Adjusted (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang hampir mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

3. Pengujian Secara Parsial

Uji t digunakan untuk membuktikan koefisien regresi antara variabel-variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y), dengan langkah-langkah pengujian sebagai berikut:

- a. Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif
Ho : $\beta = 0$, artinya Implementasi SPMI dan Budaya Mutu secara Parsial berpengaruh terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi
Ha: $\beta \neq 0$, artinya Implementasi SPMI dan Budaya Mutu secara Parsial tidak berpengaruh terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi

b. Menentukan *level of significance* (α) = 0,05 df = ($\alpha/2$; n-k-1)

c. Kriteria Pengujian

Ho diterima apabila $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$

Ho ditolak apabila $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $-t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$

Hasil dari t hitung dibandingkan dengan t tabel pada tingkat kepercayaan 95% dan taraf signifikansi 5%.

4 Hasil Analisis & Pembahasan

4.1 Hasil Uji Regresi

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	14.883	2.269		6,558	0,000
SPMI	1.265	0,106	0,544	11,913	0,000
Budaya Mutu	0,383	0,106	0,165	3,618	0,000

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh bahwa persamaan model regresi dalam penelitian ini yaitu $Y = 14,883 + 0,544X_1 + 0,165X_2$. Persamaan ini menunjukkan bahwa peningkatan masing-masing variabel X_1 dan X_2 akan meningkatkan variabel Y dengan asumsi variabel lain tetap. Hal ini berarti implementasi Sistem Pengendalian Mutu Internal dan Budaya Mutu akan meningkatkan Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi. Persamaan regresi tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi atau semakin baik Implementasi Sistem Pengendalian Mutu Internal dan Budaya Mutu maka peningkatan mutu pendidikan tinggi juga semakin baik.

4.2 Hasil Uji F

Tabel 2. Hasil uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	6212.464	2	3106.232	95.640	.000 ^a
Residual	10522.955	324	32.478		
Total	16735.419	326			

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dan kurang dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan pada tingkat kepercayaan 95% model regresi dalam penelitian ini dinyatakan signifikansi dan layak. Selain itu hasil ini juga menunjukkan adanya pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen (Sistem Pengendalian Mutu Internal dan Budaya Mutu) terhadap variabel dependen (Peningkatan Mutu) pada Perguruan Tinggi di Provinsi Bengkulu.

4.3 Hasil Uji Adjusted (R^2)

Tabel 3. Hasil Uji R^2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimate
1	0,609 ^a	0,371	0,367	5,699

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan tabel 3 diatas ouput hasil uji regresi linear berganda diketahui bahwa nilai $R^2 = 0,371$. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh setiap variabel independen, yaitu Sistem Pengendalian Mutu Internal dan Budaya Mutu terhadap variabel dependen yaitu Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi adalah sebesar 36,7 % sedang sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar yang diteliti oleh penulis.

4.4 Hasil Uji t

Tabel 4. Hasil uji t

Variabel	B	Std Error	Nilai t	Sig	Hipotesis
SPMI	0.544	0,106	11.913	0.000	Diterima
Budaya Mutu	0.165	0,106	3.618	0.000	Diterima

Sumber: Output SPSS

Hasil analisis uji t pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada variabel Sistem Pengendalian Mutu Internal nilai t sebesar 11,913 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena signifikansi kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan. Hal ini berarti variabel Sistem Pengendalian Mutu Internal berpengaruh secara signifikan terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi.

Selanjutnya, pada variabel Budaya Mutu menunjukkan nilai t positif yaitu sebesar 3,618 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan t positif sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara Budaya Mutu terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi.

4.5 Pembahasan Hipotesis

4.5.1 Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Mutu Internal Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi di Provinsi Bengkulu.

Menurut Dirjen Dikti (2010), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disuatu perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang bersangkutan, sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan dari Pemerintah. Penjaminan Mutu didefinisikan sebagai proses penetapan dan pemenuhan standarmutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi diperguruan tinggi oleh perguruan tinggi secara otonom mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sebagaimana ditetapkan dalam Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti. Suatu perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila (Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016): (1) Perguruan tinggi mampu menetapkan dan mewujudkan visinya; (2) Perguruan tinggi mampu menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar dan standar turunan; (3) Perguruan tinggi mampu menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar dan standar turunan dalam butir-butir memenuhi kebutuhan *stakeholders*.

Dengan demikian perguruan tinggi harus mampu menetapkan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu pendidikan tinggi dalam suatu sistem yang disebut SPMI, untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Implementasi SPMI di perguruan tinggi sering menemui masalah, antara lain: (1) kesadaran para pelaku proses pendidikan terhadap arti penting penjaminan mutu sebagai kebutuhan *stakeholders* relatif masih rendah; (2) pemahaman konsep sistem penjaminan mutu pendidikan oleh sivitas akademika untuk meningkatkan mutu pendidikan masih belum merata; (3) komitmen para pelaku proses pendidikan tinggi di perguruan tinggi, baik yang memimpin maupun yang dipimpin untuk senantiasa menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan relatif masih kurang; (4) Ketersediaan sumber daya manusia khususnya tenaga auditor untuk mendukung SPMI masih belum terpenuhi; dan (5) implementasi SPMI sering menjadi sebuah rutinitas menyebabkan sulit untuk mengukur ketercapaian perbaikan berkelanjutan. Orientasi terhadap mutu membutuhkan sistem penjaminan mutu agar mutu dapat

ditingkatkan secara berkelanjutan. Penjaminan mutu tersebut dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Mutu pendidikan di perguruan tinggi yang paling sering didefinisikan sebagai "kesesuaian untuk tujuan", maka jaminan mutu mengacu pada kebijakan, sikap, tindakan dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan mutu yang sedang dipertahankan dan ditingkatkan yang semuanya tercermin dalam budaya mutu. Budaya mutu tersebut dimaksudkan untuk menjamin akuntabilitas dan/atau untuk membawa perbaikan kepada peningkatan mutu pendidikan tinggi.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dimana Implementasi SPMI secara internal dimanfaatkan untuk peningkatan mutu pendidikan dalam tahap perencanaan. Temuan-temuan dalam SPMI akan dijadikan masukan untuk memperbaiki standar dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Pemanfaatan hasil implementasi SPMI selain digunakan dalam perencanaan pendidikan, juga digunakan untuk menumbuhkan semangat bekerja lebih baik, membangkitkan kesadaran untuk membangun budaya mutu, sehingga akan terwujud perbaikan yang terus menerus (*continuous quality improve-ment*). (Ahmad Sulaiman, 2016). Penelitian Bacin.A (2017) menyimpulkan bahwa Penjaminan Mutu bertujuan memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. SPMI juga harus dilakukan secara berkesinambungan sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh perguruan tinggi dapat terlaksana yaitu peningkatan mutu pendidikan tinggi (Opan Arifudin, 2019).

4.5.2 Pengaruh Implementasi Budaya Mutu Terhadap Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi di Provinsi Bengkulu.

Pentingnya implementasi Budaya Mutu dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi juga berpengaruh terhadap kepuasan *stakeholders*. Kepuasan *stakeholders* internal merupakan salah satu indikator keberhasilan mutu perguruan tinggi. Hal menunjukkan bahwa penerapan sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi sangat penting dalam meningkatkan mutu, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan apa yang diharapkan *stakeholder*. Nilai penting dari sebuah upaya dari sistem penjaminan mutu internal apabila temuan yang diperoleh ditindaklanjuti oleh perencana dan pelaksana program untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang. SPMI dibuat sebagai dasar untuk mengendalikan pengelolaan pendidikan tinggi bermutu dengan standar Nasional dan memenuhi peraturan pemerintah Republik Indonesia. Proses SPMI tidak terlepas dari kebijakan mutu, sasaran mutu penyelenggaraan pendidikan, serta seluruh dokumen mutu yang harus disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika dan pimpinan lembaga agar diimplementasikan secara optimal. (M. Fitrah, 2018). Peningkatan mutu pendidikan tinggi merupakan tugas semua unsur yang terlibat dalam dunia pendidikan tinggi. Dengan mengimplementasikan SPM Dikti yang terdiri dari SPMI, SPME dan PD Dikti diyakini bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia akan mampu membangun budaya mutu baik diperguruan tinggi masing-masing maupun akan berkontribusi pada pembangunan budaya mutu pendidikan tinggi pada tingkat nasional yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. (Ristekditi, 2017:67)

Budaya mutu yang diimplementasikan secara masif dimana semua unsur yang ada pada Perguruan tinggi akan mendukung terlaksananya Sistem Pengendalian Mutu Internal. Perilaku semua naggota organisasi mulai dari staf sampai pejabat pengambil keputusan pada perguruan tinggi yang mencerminkan budaya mutu, yaitu semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*) memiliki :pola pikir, pola sikap dan pola perilaku berdasarkan standar Dikti.

Kesimpulan & Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Sistem Pengendalian Mutu Internal dan Budaya Mutu yang baik akan dapat meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Namun hal ini sesuai dengan kondisi pada masing-masing perguruan tinggi. Karena Sistem Pengendalian Mutu Internal pada setiap perguruan tinggi akan berbeda dan hanya cocok diterapkan pada perguruan tinggi tersebut. Dengan adanya penerapan Sistem Pengendalian Mutu Internal dan Budaya Mutu secara masif dan saling bersinergi maka peningkatan mutu pendidikan tinggi akan semakin baik. Implementasi SPMI tanpa diikuti dengan budaya mutu akan berat dan hanya sekedar wacana. Budaya mutu akan melekat pada pelaku organisasi, sehingga dengan SPMI yang baik diikuti juga budaya mutu yang menjadi karakter pada semua unsur yang terlibat pada perguruan tinggi maka peningkatan mutu pendidikan tinggi akan lebih mudah tercapai.

5.2 Saran

Meski saat ini hampir semua perguruan tinggi telah menerapkan Sistem Pengendalian Mutu Internal namun penerapan budaya mutu masih kurang maksimal, terutama untuk kampus-kampus yang berada didaerah. Hendaknya Budaya Mutu menjadi karakter bagi semua unsur yang terlibat dalam perguruan tinggi dari lini terbawah hingga manajemen puncak. Selain itu pemahaman semua unsur yang terlibat pada perguruan tinggi mengenai Sistem Pengendalian Mutu Internal juga sangat penting dan tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pengelola Sistem Pengendalian Mutu Internal saja. Pemahaman ini yang akan menjadikan Sistem Pengendalian Mutu Internal dan Budaya Mutu sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Direktorat Penjaminan Mutu (2018). *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal*. Jakarta : Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa, Kementerian Ristek Dikti
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (2019). *Integrasi LMS Perguruan Tinggi Ke SPADA Indonesia. Panduan Admin*. Jakarta : Ditjen Belmawa Kementerian Ristek Dikti
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi.(2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat
- Ristekdikti (2017). *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*
- Sekaran, Uma. (2017). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2014 tentang *Penyelegaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Jurnal

- Ahmad Sulaiman, Udik Budi Wibowo(2016) *Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Gajah Mada*.Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Volume 4, No 1, April 2016 (17-32)
- Arifudin, Opan.(2019). *Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi*.Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi & Akuntansi), 3(1), 161-169
- Bacin A. (2017) *Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*. Jurnal Manajemen Pendidikan, 9(1), 1-12
- Halimatus Sakdiah (2011) *Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi*.Jurnal Insania Volume 16, No.1, Januari-April 2011 (25-38)
- I Made Pater, I Made Yudana, Nyoman Natajaya (2020). *Studi Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Mutu Internal Dalam Rangka Mewujudkan Budaya Mutu* .Jurnal Pedagogi dan Pembelajaran.Volume 3 Nomor 1
- Muh. Fitrah, Ruslan, Hendra (2018) *Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal Terhadap Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi*.Jurnal Penjaminan Mutu Volume 4, No 1, Februari 2018 (76-86)
- Legawa, I Made, Nyoman, Ida Bagus Wartha, Brata, Ida Bagus.2019. *Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Program Studi Sejarah FKIP Universitas Mahasarakswati Denpasar*.Jurnal Universitas Negeri Padang.
- Siburian, Peningkat.(2010).*Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Melalui Manajemen Yang Berorientasi Mutu*.Jurnal Generasi Kampus.Volume 3 No.1 Bulan April 2020.

Internet

- Aswitami, N.A (2018). *Penerapan Sistem Penjaminan Internal di Perguruan Tinggi*. Retrieved from Repositori SPMI Ristek Dikti :<https://spmri.ristekdikti.go.id/repositori/5a79d270a54a054991fd839>
- Gunawan, Johannes. (2018). *Membangun Budaya Mutu Dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. Kemenristekdikti.
- Handajani, J (2018) .Pentingkah Penjaminan Mutu Internal? Retrieved from Repositori SPMI Ristek Dikti :<https://spmri.ristekdikti.go.id/repositori/5a79d270a54a05499d1fd835>